

MANUAL INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PASURUAN
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)-Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)/Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)*100%	Tribulan	Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi yang di peroleh dari Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)	Tribulan	Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai IKM di peroleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Semester	Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan
		Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	Penilaian Atas Fakta Objektif Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip PD	Tahunan	Sekretariat

			Persentase Temuan Yang ditindak Lanjuti	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APEP dan APIP Tahun berjalan yang di tindak lanjuti dibandingkan dengan total temuan APEP dan APIP Tahun berjalan	(jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yang ditindaklanjuti + jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan yg di TL)x101%/ (jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan+jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan)	Tahunan	Sekretariat
--	--	--	---	---	---	---------	-------------

**MANUAL INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYNAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNGAN	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	Perbandingan Jumlah investor yang terbit tahun dan tahun lalu	$\frac{\Sigma \text{ Investor tahun } n - \Sigma \text{ Investor tahun } (n-1)}{\Sigma \text{ Investor tahun } (n-1)} \times 100\%$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal	$\Sigma \text{ dokumen kajian penanaman modal tahun } n$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	$\Sigma \text{ Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota}$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi	Perbandingan Jumlah Investor yang memiliki izin yang sudah efektif tahun ini dengan tahun lalu	$\frac{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun } n - \Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun } (n-1)}{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki izin yang sudah efektif) tahun } (n-1)} \times 100\%$	TRIBUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
5	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	Perbandingan Jumlah investor yang berminat (memiliki izin yang sudah efektif) tahun ini dan tahun lalu	$\frac{\Sigma \text{ investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } n}{\Sigma \text{ investor tahun } n} \times 100\%$	TRIBUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan usaha yang diawasi dan jumlah Kegiatan Usaha yang dibina	$\frac{\Sigma \text{ Kegiatan usaha yang diawasi th } n}{\Sigma \text{ Kegiatan Usaha yang dibina th } n} \times 100\%$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
8	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	$\Sigma \text{ pelaku usaha yang dipantau dan diawasi}$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
9	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	$\Sigma \text{ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya}$	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL

10	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Σ Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	TAHUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
11	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Σ Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	Jumlah Kuisisioner yang puas dibagi dengan jumlah Kuisisioner yang masuk dikali 100 persen	Σ Kuisisioner yang puas / Σ Kuisisioner yang masuk X 100%	SEMESTER	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Jumlah layanan perizinan ditambah dengan jumlah layanan non perizinan	Σ layanan perizinan + Σ layanan non perizinan	TRIBUNAN	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Σ pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan Σ pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan non perizinan	TRIBUNAN	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Σ Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	TRIBUNAN	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

16	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Σ Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	TRIBUNAN	BIDANG INFORMASI PENGELOLAAN DATA DAN PENGADUAN
17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Σ Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	TRIBUNAN	BIDANG PENANAMAN MODAL
18	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	Perbandingan Jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun lalu dan tahun ini	Σ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun n - Σ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun (n-1) / Σ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan tahun (n-1) X 100%	TRIBUNAN	BIDANG INFORMASI PENGELOLAAN DATA DAN PENGADUAN
19	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang terintegrasi	Σ data dan informasi perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang terintegrasi tahun (n)	TRIBUNAN	BIDANG INFORMASI PENGELOLAAN DATA DAN PENGADUAN
20	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	Σ data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan Th n	TRIBUNAN	BIDANG INFORMASI PENGELOLAAN DATA DAN PENGADUAN
21	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi atas Jumlah seluruh kebutuhan penunjang pemerintahan	Σ kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi / Jumlah seluruh kebutuhan penunjang pemerintahan X 100%	TRIBUNAN	SEKRETARIAT

22	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu atas Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	Σ dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu / Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun x 100%	TRIBULAN	SEKRETARIAT
23	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Σ dokumen perencanaan yang tersusun tahun n	TRIBULAN	SEKRETARIAT
24	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	Σ dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun th n	TRIBULAN	SEKRETARIAT
25	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	Σ dokumen evaluasi kinerja yang tersusun th n	TRIBULAN	SEKRETARIAT
26	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu atas Jumlah seluruh laporan keuangan yang tersusun	Σ laporan keuangan yang tersusun tepat waktu / Jumlah seluruh laporan keuangan yang tersusun X 100%	BULANAN	SEKRETARIAT
27	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah orang ASN yang menerima gaji	Σ orang ASN yang menerima gaji th n	BULANAN	SEKRETARIAT
28	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan / bulanan triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	Σ laporan keuangan / bulanan triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran th n	BULANAN	SEKRETARIAT
29	Kegiatan : Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah tepat waktu	Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu atas Jumlah seluruh laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu / Jumlah seluruh laporan barang milik daerah x 100%	TRIBULAN	SEKRETARIAT
30	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu	Jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu tn n	TRIBULAN	SEKRETARIAT
31	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Jumlah SDM aparatur yang meningkat kompetensinya atas Jumlah seluruh SDM aparatur	Jumlah SDM aparatur yang meningkat kompetensinya / Jumlah seluruh SDM aparatur X 100%	TRIBULAN	SEKRETARIAT

32	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dan tersusun	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dan tersusun th n	TAHUNAN	SEKRETARIAT
33	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi atas Jumlah seluruh kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / Jumlah seluruh kebutuhan layanan administrasi perkantoran x 100%	TAHUNAN	SEKRETARIAT
34	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang tersedia th n	BULANAN	SEKRETARIAT
35	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang tersedia th n	BULANAN	SEKRETARIAT
36	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia th n	BULANAN	SEKRETARIAT
37	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu th n	TRIBUNAL	SEKRETARIAT
38	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana th n	TRIBUNAL	SEKRETARIAT
39	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi atas Jumlah seluruh kebutuhan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi / Jumlah seluruh kebutuhan barang milik daerah x 100%	TAHUNAN	SEKRETARIAT
40	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Σ unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan th n	TAHUNAN	SEKRETARIAT
41	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Jumlah jasa penunjang layanan perkantoran yang terpenuhi atas Jumlah seluruh jasa penunjang layanan perkantoran yang terpenuhi	Σ jasa penunjang layanan perkantoran yang terpenuhi / Σ seluruh jasa penunjang layanan perkantoran yang terpenuhi x 100%	TAHUNAN	SEKRETARIAT

42	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat yang tersedia	Σ laporan penyediaan surat menyurat yang tersedia th n	BULANAN	SEKRETARIAT
43	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Σ laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan th n	BULANAN	SEKRETARIAT
44	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Σ laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan th n	BULANAN	SEKRETARIAT
45	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara atas Jumlah seluruh barang milik daerah	Σ barang milik daerah yang terpelihara / Jumlah seluruh barang milik daerah X 100%	TAHUNAN	SEKRETARIAT
46	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Σ kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya th n	TAHUNAN	SEKRETARIAT
47	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Σ kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya th n	BULANAN	SEKRETARIAT
48	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Σ peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara th n	BULANAN	SEKRETARIAT
49	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dipelihat/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Σ gedung kantor bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi th n	TAHUNAN	SEKRETARIAT